

Bagaimana Cara Mengurus Legalitas Perusahaan Jasa Konsultan

Pendahuluan

Mengurus legalitas perusahaan jasa konsultan adalah langkah penting untuk memastikan bisnis dijalankan secara sah dan terhindar dari masalah hukum. Legalitas yang lengkap memberi kredibilitas di mata klien dan mitra, memungkinkan operasional bisnis yang lancar, serta mencegah masalah di kemudian hari. Dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang benar, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Dalam menyusun artikel ini, beberapa sumber referensi terpercaya telah dijadikan acuan, di antaranya: (1) "aspek hukum legalitas perusahaan startup di indonesia" oleh a. Zulkifli; (2) "sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku umkm di kota surakarta" oleh d.c.w. Wijayanto dkk.; (3) "buku ajar hukum perusahaan" oleh m.t. Multazam dkk.; (4) "legalitas perusahaan (badan usaha) persero terbatas dalam kegiatan bisnis"; (5) "izin usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen" oleh a. Albeth dan p. Latumenten; (6) "analisa hukum terhadap implikasi kewajiban kepemilikan imta dan dahsuskim" oleh ramadhan; (7) "buku pintar pengurusan perizinan & dokumen" oleh h.s. Siswosoediro; (8) "pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja" oleh h. Sutrisno; dan (9) "perspektif wajib pajak umkm terhadap konsultan pajak di kota malang" oleh y. Sulistyowati.

Referensi tersebut berisi wawasan berharga mengenai aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis jasa konsultan. Salah satu kelebihan dari referensi-referensi tersebut adalah definisi yang jelas mengenai perusahaan jasa konsultan dan pentingnya legalitas bagi perusahaan tersebut dan mencakup pembahasan tentang manfaat memiliki legalitas yang lengkap bagi perusahaan konsultan, serta implikasi hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, beberapa referensi juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan penjelasan mengenai sudut pandang tentang perjanjian kerja dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pembahasan

Definisi Perusahaan Jasa Konsultan dan Pentingnya Legalitas

Perusahaan jasa konsultan adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan konsultasi profesional kepada klien dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, sumber daya

manusia, pemasaran, dan lainnya. Legalitas perusahaan jasa konsultan sangat penting karena memberikan landasan hukum yang kuat dan menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini menciptakan kepercayaan dan kredibilitas di mata klien, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat Memiliki Legalitas yang Lengkap bagi Perusahaan Konsultan

Memiliki legalitas yang lengkap memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan konsultan. Legalitas perusahaan membantu meminimalkan risiko hukum dan memberikan perlindungan bagi perusahaan dan pemiliknya[1]. Selain itu, legalitas usaha dapat meningkatkan akses terhadap pendanaan, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan peluang mendapatkan proyek atau klien baru, serta legalitas usaha memberikan legitimasi dan kepastian hukum, serta membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis[2]. Adapun langkah-langkah mengurus legalitas antara lain:

a. Menentukan Bentuk Badan Usaha

Pilihan bentuk badan usaha untuk perusahaan jasa konsultan antara lain Perseroan Terbatas (PT), Comanditer Venootschap (CV), Firma, atau Perusahaan Perorangan. Pertimbangan dalam memilih bentuk badan usaha:

- a. Modal, badan usaha PT memerlukan modal yang lebih besar daripada bentuk badan usaha lainnya seperti CV atau Firma. Jumlah modal yang dimiliki menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih bentuk badan usaha.
- b. Tanggung Jawab, pemilik PT hanya terbatas pada modal yang disetorkan, sedangkan pada CV atau Firma, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Tingkat risiko tanggung jawab yang ingin ditanggung menjadi pertimbangan penting.[3]
- c. Ekspansi Usaha, bentuk PT lebih cocok untuk usaha yang ingin berkembang besar dan melakukan ekspansi karena modalnya yang besar dan tanggung jawab terbatas.[1]
- d. Aspek Perpajakan, PT memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan bentuk badan usaha lainnya.[4]

b. Mengurus Izin Usaha

Jenis-jenis izin yang diperlukan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha konsultan, seperti izin tenaga kerja asing jika mempekerjakan tenaga asing. Prosedur dan persyaratan dapat bervariasi di setiap daerah, namun umumnya meliputi:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Melampirkan dokumen pendukung seperti akta pendirian perusahaan, fotokopi KTP pemilik, dll.
- c. Membayar biaya administrasi
- d. Memenuhi persyaratan khusus sesuai jenis izin yang diajukan

Dan untuk besaran biaya mengurus izin usaha bervariasi tergantung jenis izin dan wilayah. [5]

c. Membuat Perjanjian Kerja

Pentingnya perjanjian kerja tertulis dengan klien adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Isi perjanjian kerja meliputi:

- a. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan
- b. Jangka waktu pelaksanaan
- c. Biaya/imbalan jasa
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang disepakati seperti klausul penyelesaian sengketa, dll.

Tips dalam menyusun perjanjian kerja yang baik adalah gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu serta cantumkan klausul penyelesaian sengketa. Pastikan perjanjian ditandatangani pihak yang berwenang.[3] Perjanjian kerja yang baik harus mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi jika terjadi pelanggaran.[1]

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perusahaan jasa konsultan dapat memenuhi persyaratan legalitas usaha dan melindungi kepentingannya serta klien melalui perjanjian kerja yang mengikat secara hukum.

d. Mengurus Perizinan Tenaga Kerja

Kewajiban mengurus perizinan tenaga kerja, setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan wajib mengurus perizinan tenaga kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini juga merupakan salah satu aspek legalitas perusahaan.[6] Jenis perizinan yang diperlukan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk karyawan[7], Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan[8], Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) jika mempekerjakan tenaga asing[6], izin-izin lainnya sesuai bidang usaha dan wilayah operasional, seperti izin operasional untuk konsultan konstruksi. Kemudian prosedur dan persyaratan pengajuan perizinan seperti mengajukan permohonan kepada instansi terkait seperti dinas tenaga kerja setempat, melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti akta pendirian perusahaan, data karyawan, dl., membayar biaya administrasi, memenuhi persyaratan khusus sesuai jenis perizinan yang diajukan.

e. Mematuhi Peraturan Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi perusahaan jasa konsultan Perusahaan jasa konsultan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mematuhi peraturan perpajakan yang merupakan salah satu aspek legalitas usaha. Jenis-jenis pajak yang harus dibayar: a. Pajak Penghasilan (PPh) Badan b. Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) d. Pajak lainnya sesuai dengan aktivitas dan penghasilan perusahaan. Perusahaan harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku, melakukan pembukuan dengan baik, dan jika diperlukan dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak yang kompeten untuk menghindari sanksi hukum dan denda[3]. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga legalitas perusahaan dan

menghindari risiko hukum yang dapat menghambat kelangsungan usaha[1]. Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar[9]. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perusahaan jasa konsultan dapat memastikan aspek legalitas tenaga kerja dan perpajakan terpenuhi, sehingga dapat beroperasi dengan aman dan terhindar dari risiko hukum yang dapat menghambat kelangsungan usaha.

Kesimpulan

Mengurus legalitas perusahaan jasa konsultan merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan operasional bisnis. Legalitas memberikan landasan hukum yang kuat, menciptakan kepercayaan dan kredibilitas di mata klien, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan dapat meminimalkan risiko hukum, meningkatkan akses pendanaan, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan peluang mendapatkan proyek atau klien baru.

Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan jasa konsultan selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam mengurus legalitas usahanya. Ini mencakup memilih bentuk badan usaha yang sesuai, mengurus izin-izin yang diperlukan, membuat perjanjian kerja yang mengikat secara hukum, mengurus perizinan tenaga kerja, dan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan dapat beroperasi dengan aman, terhindar dari risiko hukum, dan memastikan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Referensi

- [1] A. Zulkifli, "ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN STARTUP DI INDONESIA," *WASAKA Huk.*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, Sep 2023.
- [2] D. C. W. Wijayanto, D. P. Sukma, F. A. W. Putri, D. Syamsiah, A. S. Nugroho, dan A. Purnomosidi, "SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA," *J. Pengabd. MANDIRI*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Feb 2024.
- [3] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, hlm. 202–202, Mar 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [4] "LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) PERSERO TERBATAS DALAM KEGIATAN BISNIS*." Diakses: 20 Mei 2024. [Daring]. Tersedia pada: [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sOtxOGJB1p0J:scholar.google.com/+Legalitas+Perusahaan+\(Badan+Usaha\)+Persero+Terbatas+Dalam+Kegiatan+Bisnis&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sOtxOGJB1p0J:scholar.google.com/+Legalitas+Perusahaan+(Badan+Usaha)+Persero+Terbatas+Dalam+Kegiatan+Bisnis&hl=id&as_sdt=0,5)
- [5] A. Albeth dan P. Latumenten, "Izin Usaha Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kegiatan Usaha Pt Lsi Yang Tidak Sesuai Dengan Izin)," *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Pendidik.*, vol. 7, no. 3, Art. no. 3, Jul 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i3.5271.
- [6] "Analisa Hukum Terhadap Implikasi Kewajiban Kepemilikan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) dan Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian) Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Laut Indonesia; Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 317/Pid.Sus/2018/Pn Amb. | Ramadhan | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)." Diakses: 21 Mei 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3150>
- [7] H. S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. VisiMedia.
- [8] H. Sutrisno, "PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA," *PREPOTIF J. Kesehat. Masy.*, vol. 4, no. 1, hlm. 78–84, Apr 2020, doi: 10.31004/prepotif.v4i1.670.
- [9] Y. Sulistyowati, "PERSPEKTIF WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KONSULTAN PAJAK DI KOTA MALANG," *OPTIMA*, vol. 2, no. 2, hlm. 24–31, Jan 2019, doi: 10.33366/opt.v2i2.1166.